



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SUB UNIT KERJA : BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AIDY FURQAN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
3. NHK : 488676

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 1500 m2 di LOMBOK UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 157.000.000

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA RODA DUA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 17.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 114.261.333

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 1.288.761.333

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.288.761.333

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **30 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.